

ABSTRAK

Studi ini mengkaji tentang perbandingan pengaturan pornografi *deepfake* antara Indonesia dan Korea Selatan. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji secara mendalam tentang pengaturan pornografi *deepfake* menurut Undang-Undang Pornografi Indonesia dan *South Korea Act On Special Cases Concerning The Punishment Of Sexual Crimes* serta urgensi pengaturan pornografi *deepfake* dalam Hukum Pidana Nasional Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Undang-Undang Pornografi Indonesia masih memiliki celah hukum dalam menangani kasus pornografi *deepfake*, karena UU tersebut masih mengarah kepada kasus pornografi secara fisik atau langsung. Sedangkan dalam *South Korea Act On Special Cases Concerning The Punishment Of Sexual Crimes* lebih rinci dalam menangani kasus pornografi *deepfake* karena tidak hanya mengatur pornografi secara langsung tetapi juga media apa yang digunakan dalam kasus pornografi tersebut. Urgensi dibentuknya pengaturan pornografi *deepfake* adalah tidak adanya payung hukum dalam menangani kasus pornografi *deepfake* di Indonesia. Hal ini menciptakan sebuah kekosongan hukum yang berakibat pada ketidakpastian hukum dalam masyarakat.

Kata kunci : Perbandingan Hukum. Urgensi. Pornografi *Deepfake*

ABSTRACT

This study examines the comparison of the regulation of deepfake pornography between Indonesia and South Korea. The purpose of this study is to examine in depth the regulation of deepfake pornography according to the Indonesian Pornography Law and the South Korean Act On Special Cases Concerning The Punishment Of Sexual Crimes as well as the urgency of regulating deepfake pornography in the Indonesian National Criminal Law. This research method uses normative legal research. The results of this study explain that the Indonesian Pornography Law still has a legal gap in dealing with cases of deepfake pornography, because the law still leads to cases of physical or direct pornography. Meanwhile, the South Korean Act On Special Cases Concerning The Punishment Of Sexual Crimes is more detailed in dealing with deepfake pornography cases because it not only regulates direct pornography but also what media is used in the pornography case. The urgency of regulating deepfake pornography is the absence of a legal protection in handling deepfake pornography cases in Indonesia. This creates a legal vacuum that results in legal uncertainty in society.

Keywords: *Comparative Law. Urgency. Deepfake Pornography*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Rumusan Masalah	8
3. Tujuan Penelitian	9
4. Manfaat Penelitian	9
5. Penelitian Terdahulu	9
6. Metode Penelitian	15
7. Sistematika Pembahasan	19
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
1. Perbandingan Hukum	20
2. Pornografi	28
3. <i>Deepfake</i>	35
BAB II : PERBANDINGAN PENGATURAN PORNOGRAFI <i>DEEPPFAKE</i> DALAM UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI INDONESIA DAN <i>SOUTH KOREA ACT ON SPECIAL CASES CONCERNING THE PUNISHMENT OF SEXUAL CRIMES</i>	
1. Pengaturan Pornografi <i>Deepfake</i> Menurut Undang-Undang Pornografi Indonesia dan <i>South Korea Act On Special Cases Concerning The Punishment Of Sexual Crimes</i>	44
2. Urgensi Pengaturan Pornografi <i>Deepfake</i> dalam Hukum Pidana Nasional Indonesia.....	65

BAB IV : PENUTUP

1. Kesimpulan 77
2. Saran 78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN